ABSTRAKSI

Salah satu aspek yang menjadi landasan utama bagi para pelaku bisnis untuk dapat berfungsi secara baik adalah tersedianya informasi yang jelas, wajar dan tepat waktu. Dalam hal ini, data keuangan, antara lain laporan keuangan, merupakan salah satu unsur yang terpenting dari informasi tersebut.

Dalam laporan keuangan kita jumpai sediaan sebagai salah satu komponen harta milik badan usaha. Selama ini, fungsi divisi pembelian dalam suatu badan usaha seringkali diremehkan. Padahal hampir sebagian besar dari pendapatan digunakan untuk mengadakan bahan baku sampai kertas surat lembur. Disamping meningkatkan biaya perawatan, perbaikan dan operasional, pembelian yang tidak berhati-hati juga akan mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran administrasi yang tinggi. Namun demikian, adapula badan usaha yang hampir bangkrut karena kesulitan bahan baku. Bagi badan usaha yang bergerak di bidang industri (*manufacturing*), sediaan merupakan salah satu unsur yang dinamis. Sediaan secara kontinu diperoleh, diproses dan kemudian akan dijual. Sediaan juga merupakan harta yang umumnya sensitif terhadap perubahan harga, kerusakan dan risiko pencurian, serta umumnya merupakan obyek manipulasi dan tempat terjadinya kesalahan material. Beberapa hal di atas menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan sediaan yang baik bagi setiap badan usaha, baik yang bergerak di bidang industri, dagang maupun jasa.

Badan usaha PT."X" adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa *verchroom*, produksi barang-barang dari logam dan peralatan rumah tangga dari plastik. Badan usaha dalam manajemen sediaannya belum disertai oleh pengamanan yang memadai dengan masih adanya perangkapan fungsi dan kegiatan yang tumpang tindih. Hal ini terlihat pada perangkapan antara fungsi pencatatan akuntansi dan fungsi pembelian, di samping itu bagian gudang yang menjalankan fungsi penyimpanan juga merangkap sebagai fungsi penerimaan barang. Selain itu, manajemen badan usaha mengeluhkan mengenai kurangnya pengendalian terhadap pemakaian bahan baku. Bagian produksi yang bertugas mengerjakan bahan baku yang telah ada untuk diproses menjadi barang jadi juga merangkap fungsi perencanaan produksi.

Pihak badan usaha menyadari bahwa siklus sediaan dan pergudangan sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/penyelewengan. Sehubungan dengan hal itu, maka diadakan

suatu pengujian kepatuhan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal badan usaha. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan saran bagi perbaikan dan penyempurnaan badan usaha.

Karena luasnya lingkup pengujian, maka dalam skripsi ini pengujian hanya dibatasi pada siklus sediaan bahan baku yang merupakan komponen yang cukup material terhadap harga pokok produksi. Pelaksanaan pengujian menggunakan *Attribute Sampling* dengan model *stop-or-go sampling*. Dalam pengujian kepatuhan ini akan diterapkan suatu tingkat kepercayaan sebesar 95% dan akan diasumsikan pula bahwa batas ketepatan atas yang diinginkan adalah sebesar 5%.

Dari hasil pengujian kepatuhan dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal badan usaha cukup memadai. Prosedur otorisasi dan pencatatan cukup baik. Walaupun demikian masih dijumpai adanya perangkapan fungsi antara beberapa bagian organisasi yang dapat semakin membuka peluang terjadinya tindakan penyelewengan, kolusi dan korupsi. Di samping itu tidak dijumpai adanya suatu bagian perencanaan produksi yang langsung bertanggung-jawab kepada pimpinan perusahaan. Selama ini bagian produksi disamping mengolah bahan baku menjadi produk jadi, juga melaksanakan perencanaan produksi sendiri. Hal ini mengakibatkan tidak adanya *internal check* atas pemakaian bahan baku yang pada akhirnya dapat merugikan badan usaha.

Untuk menghindari atau memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh karyawan, maka direkomendasikan agar badan usaha mulai mengadakan pendelegasian tugas secara tegas. Hendaknya ada pemisahan fungsi-fungsi pokok dalam badan usaha, yaitu fungsi pencatatan, fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut diharapkan akan tercipta *internal check* yang mengakibatkan pekerjaan karyawan atau unit organisasi yang satu akan diperiksa ketelitian dan keandalannya oleh karyawan atau unit organisasi yang lain. Disarankan pula agar badan usaha menerapkan penggunaan formulir bernomor urut tercetak, dengan demikian pengawasan terhadap terjadi transaksi keuangan akan lebih efektif.